



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YERMIA TIKU MUSU MAREWA
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 740469

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/160 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1058 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 431 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 385.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 155.040.021

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 4.040.040.021

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.040.040.021



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KORNELIA UNTUNG SERU**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **493359**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.524.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/260 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.949.500.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/117.67 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 65.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI GC 415 V Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 45.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 15.522.788****F. HARTA LAINNYA****Rp. 200.000.000****Sub Total****Rp. 3.850.022.788****III. HUTANG****Rp. 98.778.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.751.244.788****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MATIUS SAMPELALONG**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **499514**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.310.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m²/112 m² di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m²/192 m² di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000
3. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **---**

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **290.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **8.760.850**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **3.608.760.850**

III. HUTANG Rp. **233.300.003**

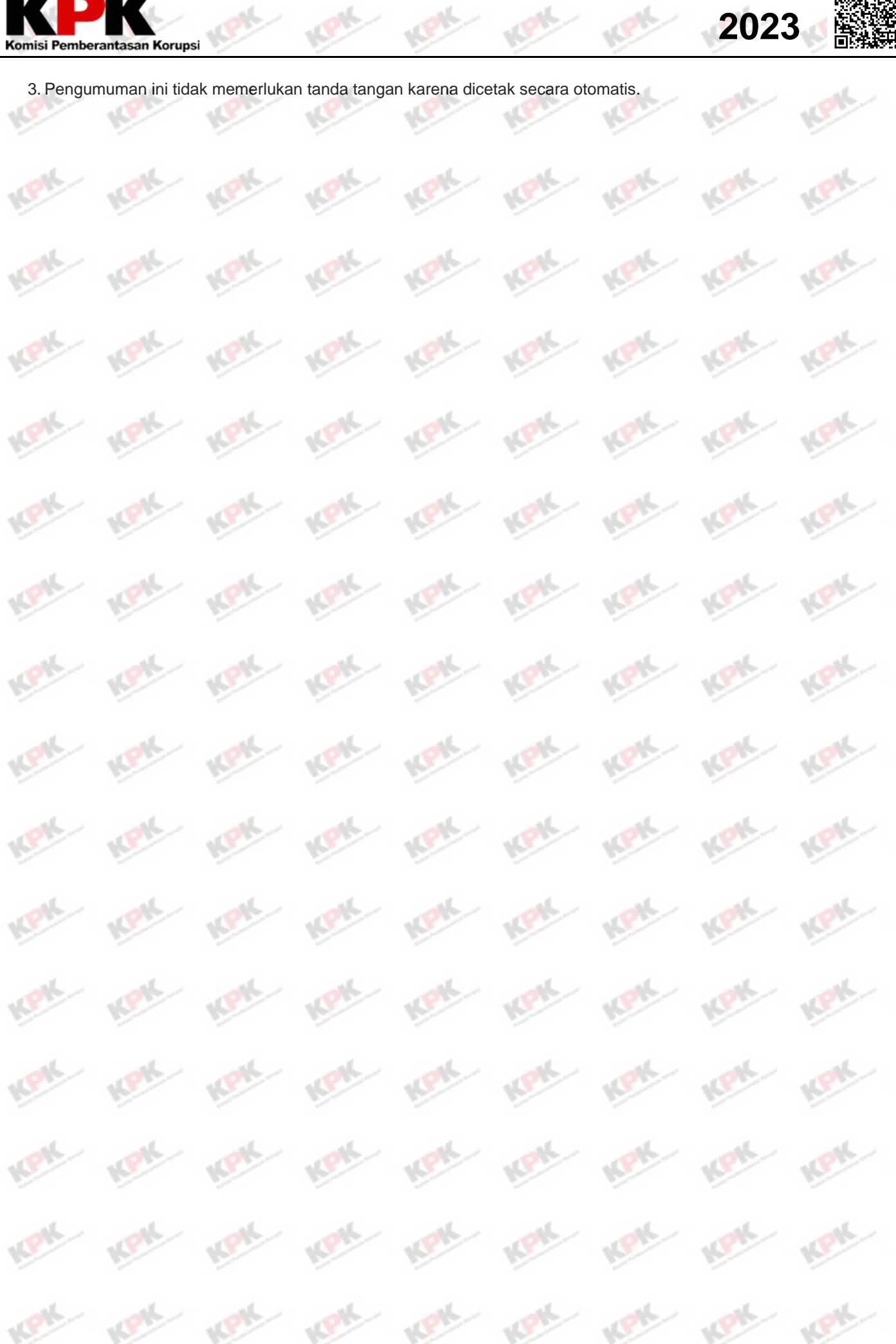
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.375.460.847**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

- Nama : YOEL TANGDIEMBONG
- Jabatan : KEPALA DINAS
- NHK : 452149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDART KF 70 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	75.000.000
Sub Total	Rp.	494.000.000
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	469.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDDY ELWARD ROMBE RARU**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **702788**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.480.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, WARISAN
Rp. 935.000.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 1950 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA,
WARISAN Rp. 995.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.817.500

1. MOBIL, DAHIATSHU TERIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
140.817.500

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 38.904.263

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.739.721.763

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.589.721.763

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUKAS PASARAI DATUBARRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 848304

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.868.424
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	26.868.424
III. HUTANG	Rp.	288.415.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-261.546.576

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD TORAJA UTARA

I. DATA PRIBADI

- Nama : MIRA BANGALINO
- Jabatan : SEKRETARIS DPRD
- NHK : 449678

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/50 m2 di KAB / KOTA BIAK NUMFOR, HADIAH Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	17.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA FICO2N28LO SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.114.919
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	507.114.919
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	507.114.919

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : AHADY TANDIRERUNG
- Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN & SUMBER DAYA MANUSIA
- NHK : 521433

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.125.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/162 m² di KAB / KOTA TORAJA UTARA, WARISAN Rp. 1.125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.500.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G (F601RM GMMF JJ) Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, YAMAHA 54D (SX225) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, YAMAHA 1KP A/T 113 CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.280.350.000

III. HUTANG Rp. 72.369.737

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.207.980.263

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.